



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1495  
Telepon : (021) 3842234, 3449230 pes.5200 (021) 3450959, 3847068 Faksimile (021)(021) 3846402, 3864776

Nomor : S- 4215A /PB/2013 18 Juni 2013  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) lampiran  
Hal : Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga  
Semester I Tahun 2013

Yth. Para Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga  
(Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2013, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan terkait informasi pendapatan dan belanja secara akrual diatur sebagai berikut:
  - a. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada Laporan Keuangan Semester I Tahun 2013 tidak wajib dilampirkan. Namun demikian, apabila terdapat Pendapatan yang Harus Diterima, Pendapatan Diterima di Muka, Belanja Dibayar di Muka, dan/atau Belanja yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2013, maka harus disajikan pada Neraca per 30 Juni 2013;
  - b. Satuan Kerja melakukan identifikasi apabila terdapat transaksi akrual per 30 Juni 2013, baik yang merupakan transaksi akrual baru (yang terjadi dari tanggal 1 Januari s/d 30 Juni 2013) maupun transaksi akrual tahun-tahun sebelumnya. Apabila ada, maka disajikan dalam Neraca Semester I tahun 2013.
2. Kebijakan terkait penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca diatur sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga diatur bahwa Laporan Keuangan Untuk Semester Yang Berakhir 30 Juni 2013, Neraca Semester I disajikan dengan membandingkan Neraca per 30 Juni 2013 dengan Neraca per 30 Juni 2012. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan maka Neraca per 30 Juni 2013 agar dibandingkan dengan Neraca per 31 Desember 2012;
  - b. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 30 Juni 2013 agar dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 30 Juni 2012.

3. Kebijakan terkait Persediaan diatur sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan paragraf 5 huruf d disebutkan bahwa termasuk dalam cakupan persediaan adalah barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;
- b. Dalam hal terdapat barang yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses pembangunan maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut agar disajikan sebagai persediaan;
- c. Penyajian sebagaimana dimaksud pada huruf b agar disertai dengan pengungkapan yang memadai dalam CaLK.

4. Kebijakan terkait penyusutan Aset Tetap diatur sebagai berikut:

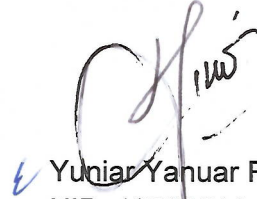
- a. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, Kementerian Negara/Lembaga diwajibkan menyajikan Akumulasi Penyusutan yang merupakan pengurang nilai pos Aset Tetap dan pengurang nilai pos Diinvestasikan Dalam Aset Tetap pada Neraca;
- b. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dinyatakan bahwa Kementerian Negara/Lembaga wajib mengungkapkan informasi berkenaan dengan Penyusutan Aset Tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang diungkapkan sekurang-kurangnya memuat: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- c. Kementerian Negara/Lembaga dapat memedomani ilustrasi penyajian dan pengungkapan penyusutan Aset tetap sebagaimana terlampir. Namun demikian ilustrasi dimaksud hanya merupakan contoh sehingga agar disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik entitas penyusun laporan keuangan masing-masing.

5. Kebijakan terkait Aset Tetap yang dalam kondisi Hilang dan/atau Rusak Berat/Usang diatur sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya, agar tidak dicantumkan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Namun demikian, Aset Tetap yang hilang tersebut agar dicantumkan dalam Daftar Barang Hilang;
- b. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7, Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya, agar tidak dicantumkan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Namun demikian, Aset Tetap yang rusak berat dan/atau usang tersebut agar dicantumkan dalam Daftar Barang Rusak Berat;
- c. Aset Tetap yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dilakukan penyusutan;
- d. Terhadap Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat yang tidak digunakan lagi sehingga dihentikan sementara dari penggunaan aktif namun belum diusulkan penghapusannya maka disajikan ke dalam kelompok Aset Lainnya dan tetap disusutkan;
- e. Sedangkan Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat yang masih digunakan (tidak dihentikan sementara dari penggunaan aktif) dan tidak diusulkan penghapusannya maka tetap disajikan sebagai Aset Tetap dan apabila masih ada umur ekonomisnya maka tetap disusutkan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur Jenderal,  
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Yuniar Yanuar Rasyid  
NIP. 19590211 198101 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan seluruh Indonesia.



Lampiran I Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 4215 A/PB/2013

Tanggal : 18 Juni 2013

No.	Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:
1	Kepala Biro Keuangan Setjen MPR
2	Kepala Biro Keuangan Setjen DPR
3	Kepala Biro Keuangan Setjen Badan Pemeriksa Keuangan
4	Kepala Biro Keuangan Setjen Mahkamah Agung
5	Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung
6	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
7	Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Setjen Kementerian Dalam Negeri
8	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Luar Negeri
9	Kepala Pusat Keuangan Setjen Kementerian Pertahanan
10	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan
12	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Pertanian
13	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perindustrian
14	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Perhubungan
16	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17	Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan
18	Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Agama
19	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Sosial
21	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Kehutanan
22	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
23	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pekerjaan Umum
24	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
25	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
27	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28	Kepala Biro Umum dan Humas Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi
30	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup
31	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
32	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
34	Kepala Biro Sekretariat Utama Keuangan Badan Intelijen Negara
35	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lembaga Sandi Negara

No.	Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:
36	Kepala Biro Setjen Keuangan Dewan Ketahanan Nasional
37	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik
38	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
39	Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Utama Badan Pertanahan Nasional
40	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional
41	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Komunikasi dan Informatika
42	Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara RI
43	Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Utama BPOM
44	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan Nasional
45	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
46	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional
47	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
48	Kepala Biro Keuangan dan Pengolahan BMN Sekretariat Utama BKKBN
49	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
50	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
51	Kepala Biro Keuangan Setjen Komisi Pemilihan Umum
52	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Mahkamah Konstitusi
53	Direktur Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
54	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama LIPI
55	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
56	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
57	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
58	Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian dan Hukum Umum Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial
59	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan TU Sekretariat Utama Badan Standardisasi Nasional
60	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional
61	Kepala Biro Umum Lembaga Administrasi Negara
62	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
63	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara
64	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
65	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perdagangan
66	Kepala Biro Umum Kementerian Perumahan Rakyat
67	Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
68	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
69	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
70	Kepala Biro Umum Komisi Yudisial
71	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
72	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama BNP2TKI
73	Kapokja Keuangan Sekretariat Badan Pelaksana BPLS



No.	Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:
74	Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama LKPP
75	Kepala Biro Umum Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
76	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal KPPU
77	Kepala Biro Keuangan Umum Sekretariat BP Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
78	Kepala Biro Umum Setjen Ombudsman RI
79	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan
80	Kepala Biro Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
81	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
82	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
83	Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
84	Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
85	Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
86	Deputi Komersil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PB Sabang

*Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta semester I Tahun 2013*

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**KANTOR PEMBINAAN AKUNTANSI INSTANSI JAKARTA  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2013 DAN 2012**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	SMT I TA 2013			SMT I TA 2012
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	50.000.000	45.000.000	90,00	40.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>50.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>90,00</b>	<b>40.000.000</b>
<b>BELANJA</b>					
1. Belanja Pegawai	B.2	1.100.000.000	1.000.000.000	90,91	800.000.000
2. Belanja Barang	B.3	350.000.000	290.000.000	82,86	250.000.000
3. Belanja Modal	B.4	550.000.000	510.000.000	92,72	130.000.000
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>90,00</b>	<b>1.180.000.000</b>



## II. NERACA

KANTOR PEMBINAAN AKUNTANSI INSTANSI JAKARTA  
NERACA

PER 30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

( dalam Rp )

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	30 JUNI 2013	31 DESEMBER 2012
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>	<b>C.1</b>		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	Rp 60.000.000	Rp 50.000.000
Kas di Bendahara Penerimaan Kas	C.1.2	Rp 60.000.000	Rp 50.000.000
Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	Rp 60.000.000	Rp 50.000.000
Jumlah Kas dan Bank		Rp 180.000.000	Rp 150.000.000
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	Rp 60.000.000	Rp 50.000.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.5	Rp (22.100.000)	Rp (22.000.000)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	Rp 60.000.000	Rp 40.000.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TPA	C.1.7	Rp (22.100.000)	Rp (2.000.000)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.1.8	Rp 60.000.000	Rp 40.000.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TGR	C.1.9	Rp (22.100.000)	Rp (2.000.000)
Jumlah Piutang (Bersih)		Rp 113.700.000	Rp 104.000.000
Belanja Dibayar Dimuka	C.1.10	Rp 100.000.000	Rp -
Persediaan	C.1.11	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>Rp 399.700.000</b>	<b>Rp 258.000.000</b>
<b>Aset Tetap</b>	<b>C.2</b>		
Tanah	C.2.1	Rp 1.200.000.000	Rp 600.000.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	Rp 288.500.000	Rp 233.500.000
Gedung dan Bangunan	C.2.3	Rp 1.200.000.000	Rp 700.000.000
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000
KDP	C.2.6	Rp 30.000.000	Rp 50.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(Rp 365.004.167)	-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>Rp 2.433.495.833</b>	<b>Rp 1.613.500.000</b>
<b>Piutang Jangka Panjang</b>	<b>C.3</b>		
TPA	C.3.1	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	C.3.2	Rp (21.050.000)	Rp (2.000.000)
TP/TGR	C.3.3	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.4	Rp (21.050.000)	Rp (2.000.000)
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)</b>		<b>Rp 37.900.000</b>	<b>Rp 76.000.000</b>
<b>Aset Lainnya</b>	<b>C.4</b>		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	Rp 8.500.000	Rp 8.500.000
Aset Lain-Lain	C.4.2	Rp 36.000.000	Rp 50.000.000
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya		(Rp 35.600.000)	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>Rp 8.900.000</b>	<b>Rp 58.500.000</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>Rp 2.879.995.833</b>	<b>Rp 1.392.500.000</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>C.5</b>		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	Rp 60.000.000	Rp 50.000.000
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	Rp 60.000.000	Rp 50.000.000
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.5.3	Rp 120.000.000	Rp 100.000.000
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.4	Rp 60.000.000	Rp 50.000.000
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>Rp 300.000.000</b>	<b>Rp 250.000.000</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>Rp 300.000.000</b>	<b>Rp 250.000.000</b>
<b>EKUITAS DANA</b>			
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>C.6</b>		
Cadangan Piutang	C.6.1	Rp 113.700.000	Rp 104.000.000
Cadangan Persediaan	C.6.2	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.6.3	Rp (60.000.000)	Rp (50.000.000)
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.6.4	Rp 100.000.000	Rp -
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.6.5	Rp (60.000.000)	Rp (50.000.000)
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>Rp 99.700.000</b>	<b>Rp 8.000.000</b>
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>C.7</b>		

*Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta Semester I Tahun 2013*

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.7.1	Rp 2.433.495.833	Rp 1.000.000.000
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.7.2	Rp 46.800.000	Rp 134.500.000
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>Rp 2.480.295.833</b>	<b>Rp 1.134.500.000</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>Rp 2.579.995.833</b>	<b>Rp 1.142.500.000</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>Rp 2.879.995.833</b>	<b>Rp 1.392.500.000</b>

### III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### A. PENJELASAN UMUM

##### A.1. DASAR HUKUM

-----

##### A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR PEMBINAAN AKUNTANSI INSTANSI JAKARTA

-----

##### A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

-----

##### A.4 . KEBIJAKAN AKUNTANSI

-----

##### (1) Pendapatan

-----

##### (2) Belanja

-----

##### (3) Aset

-----

##### (4) Ekuitas Dana

-----

##### (5) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

-----

##### (6) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah
  - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

*Penyusutan  
Aset Tetap*



- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

## C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

### C.1. Aset Lancar

-----

Nilai Buku Aset Tetap  
Rp2.433.495.833

### C.2 Aset Tetap

Nilai perolehan Aset Tetap per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.798.500.000,00 dan Rp1.613.500.000,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 21  
Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	30-Jun-13	31-Des-12
1	Tanah	Rp 1.200.000.000	Rp 600.000.000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 288.500.000	Rp 233.500.000
3	Gedung dan Bangunan	Rp 1.200.000.000	Rp 700.000.000
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000
6	KDP	Rp 30.000.000	Rp 50.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 2.798.500.000</b>	<b>Rp 1.613.500.000</b>
Akm. Penyusutan		Rp (365.004.167)	Rp -
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>		<b>Rp 2.433.495.833</b>	<b>Rp 1.613.500.000</b>

Tanah Rp 1.200.000.000

#### C.2.1 Tanah

Nilai perolehan Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp1.200.000.000 dan Rp600.000.000 Kenaikan nilai tersebut diakibatkan karena Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta melakukan pengadaan tanah baru yang terletak di Jl Budi Utomo, Jakarta sesuai dengan akta jual beli No.003/Akta/2013 tanggal 10 Maret 2013.

Rincian saldo tanah per 30 Juni 2013 terdiri dari:

Tabel 22  
Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas	Nilai
1	12120000	10,000 m2	Rp 600.000.000
2	12120001	10,000 m2	Rp 500.000.000
3	12200000	1,000 m2	Rp 100.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 1.200.000.000</b>

Tanah seluas 10.000 m2 yang terletak di Jl Andi Tonro, Tanah Abang, Jakarta, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.

Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta telah melakukan usaha-usaha dalam rangka pengamanan BMN tersebut, antara lain dengan membentuk tim pengamanan dan penyelesaian BMN, melakukan koordinasi aktif dengan Biro Umum Kantor Pusat, KPKNL dan DJKN Kementerian Keuangan.

Nilai Buku Peralatan dan  
Mesin Rp171.408.333

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp288.500.000 dan Rp233.500.000. Sedangkan nilai buku peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp171.408.333. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp233.500.000</b>
Mutasi Masuk:	
- pembelian	80.000.000
Mutasi Keluar	
- reklasifikasi menjadi aset lain-lain	(25.000.000)
<b>Saldo per 30 Juni 2013</b>	<b>288.500.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2013	(117.091.667)
<b>Nilai Buku Per 30 Juni 2013</b>	<b>Rp171.408.333</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

- Penambahan dari pembelian 10 unit personal komputer (PC) senilai Rp80.000.000
- Pengurangan karena reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain berupa Peralatan Rumah Tangga dan Kantor yang sudah tidak digunakan dalam operasional satuan kerja senilai Rp25.000.000
- Nilai dan Perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan dalam Tabel 23.

Nilai Buku Gedung dan  
Bangunan  
Rp1.018.000.000

### C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan gedung dan bangunan per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp1.200.000.000 dan Rp700.000.000. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp1.018.000.000. Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp700.000.000</b>
Mutasi Masuk:	
- pengembangan gedung kantor	500.000.000
<b>Saldo per 30 Juni 2013</b>	<b>1.200.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2013	(182.000.000)
<b>Nilai Buku Per 30 Juni 2013</b>	<b>Rp1.018.000.000</b>

Mutasi gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan untuk pengembangan gedung kantor senilai Rp500.000.000
- Nilai dan Perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan dalam Tabel 24.

Nilai Buku Jalan, Irigasi  
dan Jaringan  
Rp27.812.500

#### C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp45.000.000 dan Rp45.000.000. Nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp27.812.500 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp17.187.500. Tidak terjadi perubahan nilai terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta sampai dengan 30 Juni 2013. Perhitungan nilai penyusutan disajikan dalam Tabel 25.

#### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah Rp35.000.000 dan Rp35.000.000 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Aset Tetap Lainnya tersebut adalah berupa Alat Musik Modern. Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp21.875.000, sedangkan nilai akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp13.125.000. Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan dalam Tabel 26.

Nilai Buku Aset Tetap  
Lainnya Rp21.875.000

#### C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp60.000.000 yang merupakan pembangunan Pos Satpam yang proses pengerjaannya belum

Konstruksi dalam  
Pengerjaan (KDP)  
Rp30.000.000

selesai sampai dengan tanggal neraca.

<b>Saldo per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp60.000.000</b>
Mutasi Masuk:	
- pembangunan pos satpam	Rp30.000.000
Mutasi Keluar	
- Gedung yang sudah selesai	(Rp60.000.000)
<b>Saldo per 30 Juni 2013</b>	<b>Rp30.000.000</b>

### C.3 Piutang Jangka Panjang

-----  
-----

### C.4. Aset Lainnya

Nilai Buku Aset Lainnya  
Rp8.900.000

Jumlah Aset Lainnya per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp44.500.000 dan Rp58.500.000 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

Tabel 27  
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	30 Juni 2013	31 Des 2012
1	Aset Tak Berwujud	Rp 8.500.000	Rp 8.500.000
2	Aset Lain-Lain	Rp 36.000.000	Rp 50.000.000
<b>Nilai Perolehan</b>		<b>Rp 44.500.000</b>	<b>Rp 58.500.000</b>
Akumulasi Penyusutan		Rp (35.600.000)	0
<b>Nilai Buku</b>		<b>Rp 8.900.000</b>	<b>Rp 58.500.000</b>

#### C.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud  
Rp8.500.000

Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp8.500.000 dan Rp8.500.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian ATB per 30 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 28  
Rincian Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
1	Microsoft office	Rp 2.500.000
2	Avira Antivirus	Rp 1.000.000
3	MYOB Accounting	Rp 5.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 8.500.000</b>

Sampai dengan 30 Juni 2013 tidak terdapat penambahan dan pengurangan nilai perolehan untuk Aset Tidak Berwujud.

#### C.4.2 Aset Lain-Lain

Nilai Buku Aset Lain-Lain  
Rp400.000

Aset Lain-Lain adalah merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta. Nilai perolehan Aset Lain-Lain per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp36.000.000 dan Rp50.000.000. Sedangkan nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp400.000.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Nilai perolehan per 31 Desember 2012</b>	<b>Rp50.000.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	4.000.000
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	(6.000.000)
- penghapusan BMN	(12.000.000)
<b>Nilai perolehan per 30 Juni 2013</b>	<b>36.000.000</b>
Akm. Penyusutan	35.600.000
<b>Nilai Buku Per 30 Juni 2013</b>	<b>Rp400.000</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan berasal dari reklasifikasi peralatan kantor sebesar Rp4.000.000 yang tidak lagi digunakan dalam operasional kantor dan dalam kondisi rusak berat.
- Pengurangan berasal dari penggunaan kembali peralatan komputer senilai Rp6.000.000 sesuai dengan surat Kepala Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta No. S-234/KBAP/Aset/2013 tanggal 14 Februari 2013.
- Pengurangan lainnya berasal dari penghapusan kendaraan bermotor roda 2 senilai Rp12.000.000 sesuai dengan Surat Penghapusan Kepala Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta no. Kep-234/Aset/05/2013 tanggal 01 Juni 2013
- Nilai dan Perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan dalam Tabel 29.



**Tabel 23**  
*Penghitungan Penyusutan dan Akumulasi Peralatan dan Mesin*

No	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Bruto	Akm.Penyusutan Awal	Penyusutan SMT I 2013	Akm. Penyusutan s.d. 30-06-2013	Nilai Buku per 30-06-2013
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	175.000.000	75.000.000	12.500.000	87.500.000	87.500.000
2	Alat Kantor	5	22.000.000	11.000.000	2.200.000	13.200.000	8.800.000
3	Alat Rumah Tangga	5	4.000.000	1.200.000	400.000	1.600.000	2.400.000
4	Komputer Unit	4	80.000.000	-	10.000.000	10.000.000	70.000.000
5	Peralatan Komputer	4	5.000.000	2.500.000	625.000	3.125.000	1.875.000
6	Peralatan Olahraga	3	2.500.000	1.250.000	416.667	1.666.667	833.333
<b>Jumlah</b>			<b>288.500.000</b>	<b>90.950.000</b>	<b>26.141.667</b>	<b>117.091.667</b>	<b>171.408.333</b>

**Tabel 24**  
*Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Gedung dan Bangunan*

No	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Bruto	Akm.Penyusutan Awal	Penyusutan SMT I 2013	Akm. Penyusutan s.d. 30 -06- 2013	Nilai Buku per 30-06-2013
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	1.100.000.000	154.000.000	11.000.000	165.000.000	935.000.000
2	Bangunan Gedung tempat Tinggal	50	100.000.000	16.000.000	1.000.000	17.000.000	83.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>1.200.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>182.000.000</b>	<b>1.018.000.000</b>

**Tabel 25**

*Perhitungan Penyusutan dan Akumulasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan*

No	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Bruto	Akm.Penyusutan Awal	Penyusutan SMT I 2013	Akm. Penyusutan s.d. 30 -06- 2013	Nilai Buku per 30-06-2013
1	Jaringan air minum	30	15.000.000	6.000.000	250.000	6.250.000	8.750.000
2	Jaringan listrik	40	25.000.000	7.500.000	312.500	7.812.500	17.187.500
3	Jaringan telepon	20	5.000.000	3.000.000	125.000	3.125.000	1.875.000
<b>Jumlah</b>			<b>45.000.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>687.500</b>	<b>17.187.500</b>	<b>27.812.500</b>

**Tabel 26**

*Penghitungan Penyusutan dan Akumulasi Aset Tetap Lainnya*

No	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Bruto	Akm.Penyusutan Awal	Penyusutan SMT I 2013	Akm. Penyusutan s.d. 30-06-2013	Nilai Buku per 30-06-2013
1	Alat musik modern	4	35.000.000	8.750.000	4.375.000	13.125.000	21.875.000
<b>Jumlah</b>			<b>35.000.000</b>	<b>8.750.000</b>	<b>4.375.000</b>	<b>13.125.000</b>	<b>21.875.000</b>

**Tabel 29**

*Penghitungan Penyusutan dan Akumulasi Aset Lain-Lain*

No	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Bruto	Akm.Penyusutan Awal	Penyusutan SMT I 2013	Akm. Penyusutan s.d. 30-06-2013	Nilai Buku per 30-06-2013
1	Alat Kantor	5	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-
2	Alat Rumah Tangga	5	4.000.000	3.200.000	400.000	3.600.000	400.000
3	Komputer Unit	4	25.000.000	21.875.000	3.125.000	25.000.000	-
4	Peralatan Komputer	4	5.000.000	4.375.000	625.000	5.000.000	-
<b>Jumlah</b>			<b>36.000.000</b>	<b>31.450.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>35.600.000</b>	<b>400.000</b>

Ket:

Nilai Bruto adalah nilai aset tetap per tanggal 30 Juni 2013 sebelum disusutkan (nilai yang dapat disusutkan)

Akm. Penyusutan Awal adalah jumlah akumulasi penyusutan pada awal Januari 2013

Penyusutan SMT I adalah jumlah nilai penyusutan untuk SMT I tahun 2013